

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah yang sering muncul dan selalu dihadapi pada saat pengambilan kebijakan ekonomi baik pemerintah daerah maupun pusat, dan tidak terkecuali pada Provinsi Jawa Timur. Hal ini di akibatkan karena terjadinya penambahan penduduk yang tidak diimbangi oleh penambahan penyedia lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Permasalahan ketenagakerjaan merupakan masalah yang belum dapat terselesaikan sampai pada saat ini, maka dari itu peran dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengurangi atau bahkan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan ini.

Semakin tingginya penambahan penduduk maka semakin sempit lapangan pekerjaan yang tersedia dan dengan semakin berkembangnya zaman para penyedia lapangan pekerjaan yang layak memiliki kriteria sumberdaya tertentu dalam menerima tenaga kerja seperti memiliki kemampuan dan lebih terampil dalam bekerja, sehingga sumberdaya yang tidak memiliki kemampuan dan keterampilan khusus akan tersingkirkan dari pasar tenaga kerja dan tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, bahkan menjadi pengangguran yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan kesejahteraan di setiap daerah yang berdampak pada meningkatnya tingkat kriminalitas dan tingkat kemiskinan, maka dari itu dorongan dari sektor-sektor dalam pariwisata sangat dibutuhkan dan menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Sektor pariwisata dapat dikatakan sektor yang siap dalam penyerapan tenaga kerja karena tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan baru tetapi juga dapat menghidupkan pekerja yang ada disekitar tempat wisata tersebut. Hal ini dapat menggambarkan bahwa pembangunan-pembangunan yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan sektor pariwisata dapat menyerap tenaga kerja seperti pembangunan hotel, restoran dan yang lain-lain.

Apabila dilihat pada kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan produksi sektor jasa, pertambahan produksi barang modal dan pertambahan jumlah sekolah.

Di Provinsi Jawa Timur sektor pariwisata merupakan sektor unggulan dengan menyumbangkan ke PDRB sebesar 16,11% .Dengan kata lain, sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan daerah maupun pendapatan nasional yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 1.1 Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Provinsi Jawa Timur (2013-2015)**

<b>Tahun</b>	<b>Tenaga Kerja (Jiwa)</b>
<b>2013</b>	<b>844.293</b>
<b>2014</b>	<b>883.851</b>
<b>2015</b>	<b>925.507</b>

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur (Tahun 2013-2015)*

Pada tabel diatas dapat dilihat seberapa besar penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata pada periode 2013-2015 yang mengalami peningkatan, pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata sebesar 844.293 jiwa sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan kembali sebesar 883.851

jiwa, kemudian pada tahun 2015 merupakan sinyal bahwa sektor pariwisata kembali mengalami peningkatan sebesar 925.507 jiwa yang menandakan tenaga kerja disektor pariwisata dapat terserap kembali.

Di Jawa Timur terdapat banyak sekali obyek wisata yang dapat ditemukan mulai dari wisata alam, wisata kuliner, wisata sejarah dan budaya ada di Jawa Timur. Dengan potensi wilayah yang sangat mendukung pemerintah Jawa Timur telah melakukan peningkatan dari segi infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung potensi wisata ini agar lebih berkembang lagi. Pada saat ini telah terjadi pergeseran budaya dimana masyarakat Indonesia ataupun mancanegara lebih sering berwisata dan menjadikan kegiatan ini sebagai rutinitas setiap tahunnya.

Adanya pergeseran budaya tersebut, Jawa Timur sebagai daerah pariwisata telah banyak melakukan perubahan-perubahan dan menambah lokasi-lokasi wisata yang ada di Jawa Timur, seperti melakukan renovasi jalan, menyediakan lahan parkir yang luas agar para pejalan kaki merasa nyaman dan mengembangkan obyek-obyek wisata alam serta obyek wisata lainnya. Perubahan yang terjadi pada sektor pariwisata di Provinsi Jawa Timur merupakan hal yang menarik untuk dibahas, sebab sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dan salah satu solusi untuk mengurangi masalah ketenagakerjaan dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat Provinsi Jawa Timur.

Sektor pariwisata yang ada di Provinsi Jawa Timur sangat berkembang pesat dengan didukung oleh kebijakan pemerintah dengan cara memberdayakan potensi desa wisata dengan cara melibatkan masyarakat, dengan demikian menjadikan lokasi-lokasi wisata menjadi lebih banyak pilihan, ditambah dengan adanya program-program yang berbasis desa wisata sehingga pelestarian lingkungan para pelaku usaha lebih

mengembangkan konsep wisata alam seperti pantai, danau, sungai, dan pegunungan serta seni budaya. Seperti yang diketahui jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jawa Timur dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

**Tabel 1.2 Wisatawan Asing dan Nusantara Provinsi Jawa Timur (2013-2015)**

<b>Tahun</b>	<b>Wisman</b>	<b>Wisnu</b>	<b>Total</b>
<b>2013</b>	<b>225.041</b>	<b>2.726.452</b>	<b>2.951.493</b>
<b>2014</b>	<b>217.193</b>	<b>2.789.940</b>	<b>3.007.133</b>
<b>2015</b>	<b>200.657</b>	<b>2.956.682</b>	<b>3.157.339</b>

*Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur (Tahun 2013-2015)*

Kunjungan wisatawan biasanya terbagi atas 2 kategori yaitu wisman (wisatawan mancanegara) dan wisnus (wisatawan nusantara) berdasarkan tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke provinsi jawa timur pada periode 2013-2015 secara total keseluruhan.

Apabila dibedakan antara jumlah wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) maka dapat terlihat perbedaan yang terjadi pada keduanya di periode 2013-2015. Pada periode 2013- 2015 jumlah wisatawan mancanegara mengalami penurunan yaitu pada tahun 2013- 2014 jumlah wisatawan mancanegara mengalami penurunan dari jumlah 225.041 jiwa turun menjadi 217.193 jiwa.

Kemudian pada tahun 2015 terjadi penurunan kembali jumlah wisman sebesar 200.657 jiwa. Pada sisi wisatawan nusantara periode 2013-2015 jumlah kunjungan wisatawan nusantara selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya hal ini didorong oleh perbedaan biaya yang dikeluarkan oleh wisman dan wisnus, serta penggunaan wisnus terhadap fasilitas atau akomodasi sektor pariwisata



sangat kecil dibandingkan dengan wisman, karena kebanyakan wisnus dari luar Jawa Timur yang masih terbelang dalam lingkup pulau jawa dan sekitarnya.

**Tabel 1.3 Jumlah Hotel Bintang dan Non Bintang Prov. Jawa Timur (2013-2015)**

<b>Tahun</b>	<b>Hotel (Unit)</b>
<b>2013</b>	<b>1.902</b>
<b>2014</b>	<b>1.993</b>
<b>2015</b>	<b>3.397</b>

*Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur (Tahun 2013-2015)*

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah hotel berbintang dan hotel non bintang dari tahun 2013-2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah hotel sebesar 1.902 unit kemudian pada tahun 2014 jumlah hotel sebesar 1.993 unit dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 3.397 unit, dari data tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun 3 tahun (2013-2015) terjadi penambahan jumlah hotel yang sangat besar dengan jumlah 1.495 hotel baik itu hotel berbintang maupun hotel non bintang. Hal ini menggambarkan bahwa permintaan hotel di Jawa Timur sangat tinggi.

Hal ini dapat menggambarkan bahwa dengan adanya perubahan jumlah hotel di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur merupakan sinyal baik bahwa potensi sektor pariwisata yang ada di Provinsi Jawa Timur sangat banyak diminati oleh para wisatawan baik itu wisman maupun wisnus.

**Tabel 1.4 Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Timur (2013-2015)**

<b>Tahun</b>	<b>UMK (Rupiah)</b>
<b>2013</b>	<b>43.323.850</b>
<b>2014</b>	<b>49.967.787</b>
<b>2015</b>	<b>58.800.150</b>

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (Tahun 2013-2015)*

Pada tabel 1.4 dapat menunjukkan bahwa upah minimum Kabupaten/Kota Jawa Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan pada periode 2013 sampai 2016. Pada tahun 2013 upah minimum kabupaten/kota sebesar Rp 43.323.850.

Kemudian pada tahun 2014 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 49.967.787 dan pada tahun 2015 telah naik sebesar Rp 58.800.150 juta. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Timur untuk melindungi para tenaga kerja agar para pekerja mendapatkan gaji yang layak sehingga mendapatkan kesejahteraan.

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Hotel dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap penyerapan tenaga kerja hotel di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur?

### **C. Batasan Masalah**

Secara umum pembahasan masalah ini sangatlah luas. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah agar lebih fokus. Penelitian ini hanya berkaitan Jumlah Hotel bintang dan non bintang, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang akan diuji pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja hotel Provinsi Jawa Timur tahun 2013 sampai 2015.

### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Menjelaskan pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Hotel dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap penyerapan tenaga kerja hotel Provinsi Jawa Timur tahun 2013 - 2015.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a) Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini digunakan dapat memperluas pengetahuan ilmu secara teoritis dan menjadi tambahan dalam pengembangan penelitian

selanjutnya mengenai pengaruh penyerapan tenaga kerja hotel di Provinsi Jawa Timur.

b) Kegunaan Praktis

1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta informasi mengenai gambaran hotel untuk masyarakat umumnya dan pekerja sektor industri pariwisata

2) Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Diharapkan penelitian ini dapat memberi gambaran pada Provinsi Jawa Timur mengenai keadaan industri pariwisata, serta kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja hotel

